

PERAN PEMERINTAH JAWA BARAT DALAM PEREKONOMIAN DI JAWA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

¹Berry Natanael Montana, ²Sri Zul Chairiyah

^{1,2}Universitas Padjadjaran

¹berry20001@mail.unpad.ac.id ²srizul_chairiyah@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Jawa Barat dalam usaha pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Ada 9 prioritas dari kebijakan pemerintah Jawa Barat, yaitu 1) Desentralisasi pelayanan kesehatan; 2) Pertumbuhan ekonomi dengan basis inovasi; 3) Akses pendidikan; 4) Pendidikan agama; 5) Pengembangan infrastruktur dan destinasi wisata; 6) Gerbang (gerakan membangun) desa; 7) Konektivitas wilayah; 8) Inovasi penataan daerah dan pelayanan publik; 9) Subsidi golongan ekonomi lemah. Kebijakan – kebijakan pemerintah dianalisis dengan melihat realisasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terjadi di lapangan. Data didapatkan dari RKPD yang dipaparkan pada acara BAPPEDA Jabar dengan melihat keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci : *Pemerintah Jawa Barat, Kebijakan, Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

This paper aims to analyze the role of the West Java government in efforts to grow the economy during the Covid-19 pandemic. There are 9 priorities from the West Java government policy, namely 1) Decentralization of health services; 2) Economic organization based on innovation; 3) Access to education; 4) Religious education; 5) Development of infrastructure and tourist destinations; 6) Building movement of the village; 7) Regional connectivity; 8) Regional structuring innovation and public services; 9) Subsidies for economically weak groups. Government policies are analyzed by looking at the realization of the implementation of government policies that occur in the field. The data was obtained from the RKPD which was presented at the West Java BAPPEDA event by looking at the alignment between government policies and practices that occur in the field.

Keywords : *West Java Government, Policy, Economic Growth*

A. PENDAHULUAN

Covid-19 adalah masalah yang harus kita atasi bersama. Keberadaan virus ini telah memusnahkan seluruh aspek kehidupan. Pemerintah Jawa Barat sendiri telah berperan dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan menerapkan PSBB di seluruh kabupaten/kota. Menurut data Pikobar Jabar, Provinsi Jawa Barat telah menerapkan PSBB sejak 15 April 2020.

Pemerintah Daerah Jawa Barat telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Jawa

Barat tentang Rancangan Batas Anggaran Sementara untuk Kebijakan Umum Prioritas Anggaran (RKUA-PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2021 memutuskan untuk fokus secara khusus pada dampak pandemi, yang mencakup bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Pemerintah Jawa Barat sendiri memiliki sembilan prioritas pembangunan, yaitu 1) Desentralisasi pelayanan kesehatan; 2) Pertumbuhan ekonomi dengan basis inovasi; 3) Akses pendidikan; 4) Pendidikan agama; 5) Pengembangan infrastruktur dan destinasi

wisata; 6) Gerbang (gerakan membangun) desa; 7) Konektivitas wilayah; 8) Inovasi penataan daerah dan pelayanan publik; 9) Subsidi golongan ekonomi lemah.

Perlambatan ekonomi merupakan masalah krusial yang perlu diatasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kemajuan nasional. Seiring kemajuan ekonomi suatu negara, sektor lain akan mengikuti. Pemerintah Jawa Barat menghadapi kondisi dimana pertumbuhan ekonomi melambat akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS Jabar, sekitar -2,44% perekonomian Jabar mengalami penurunan selama pandemi dibandingkan tahun 2019. Di sektor lain, perekonomian Jawa Barat terus menunjukkan angka positif pada perusahaan air minum, komunikasi dan informasi, pengelolaan limbah, limbah, dan daur ulang.

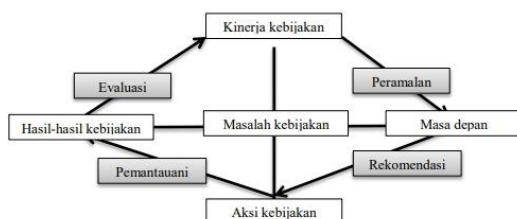
B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan studi kasus kualitatif yang diperoleh dari metode analisis observasional, serta data dan analisis agensi secara langsung pada kehidupan masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah

James E. Anderson mendefinisikan politik sebagai rangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, dikejar dan dilakukan oleh sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu. Sementara itu, Irfan Islamy mengatakan bahwa hikmah adalah taktik dan strategi yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan.



Gambar 1

Kebijakan berorientasi pada masalah

Ada tiga bentuk analisis kebijakan yang diungkapkan oleh Dunn, yaitu:

- Analisis kebijakan prospektif adalah analisis yang memfokuskan penyelidikannya pada konsekuensi kebijakan sebelum diterapkan. Model ini disebut model penskoran.
- Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis konsekuensi kebijakan setelah penerapannya. Model ini disebut model penilaian.
- a. Politik inklusif adalah bentuk penggabungan analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, menurut Prof. Kunnet, adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang meningkatkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memantau perkembangan kebijakan yang dilakukan di wilayah hukumnya dan dapat mem-back up dengan aturan yang berlaku di masyarakat.



Gambar 2

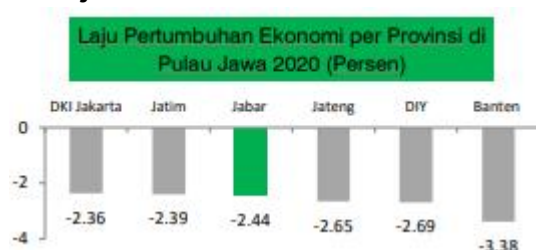
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia (Data BAPPEDA tahun 2021)

Perbedaan data laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Barat menunjukkan penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Dari data tahun 2019 terlihat bahwa data pertumbuhan ekonomi turun sebesar -2,44%. Data perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan selama pandemi, seperti yang ditunjukkan oleh data pada top chart yang mengalami penurunan antara tahun 2019 dan 2020, yaitu turun sebesar -2,07% untuk Indonesia pada tahun 2019.

Dari data tersebut terlihat bahwa pandemi berdampak pada semua aspek kehidupan, terutama ekonomi. Banyak korban pandemi memaksa masyarakat mengadopsi kebiasaan baru.

Tingkat pengeluaran yang harus dipenuhi rumah tangga juga merupakan tingkat sebelum pandemi dan juga tidak akan sama selama pandemi. Hanya orang dengan pendapatan stabil yang tidak terpengaruh oleh pandemi.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Data BAPPEDA tahun 2021

Gambar 3
Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan data tersebut, laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat diketahui mengalami penurunan sebesar -2,44% selama masa pandemi. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. Meskipun demikian, DIY, Jawa Tengah, dan Banten mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang parah akibat pandemi Covid-19.

4. Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat



Data BAPPEDA tahun 2021

Gambar 4
Tren Persentase dan Jumlah dari Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat

Supriatna menjelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba terbatas yang terjadi tetapi bukan merupakan kehendak orang yang bersangkutan. Nugroho berpendapat bahwa kemiskinan muncul dari identifikasi dan pengukuran sekelompok kelompok atau komunitas, selanjutnya disebut sebagai orang miskin. Pada masa pandemi sekitar 2019-2020, daya beli orang cenderung menurun sehingga memaksa tutupnya usaha hingga berujung pada PHK massal.

Dari Gambar 4 terlihat bahwa penduduk miskin meningkat 0,97% dari 6,91% menjadi 7,88% selama pandemi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu daya beli dan kebiasaan ekonomi lainnya yang tentunya akan berdampak.

Menurut Dennis terdapat tiga strategi dasar dari program untuk membantu masyarakat miskin, yaitu:

- Bantuan difokuskan untuk mengatasi kekurangan standar hidup orang miskin melalui program kehidupan manusia yang penting.
- Bantuan disalurkan ke tempat-tempat yang paling banyak dihuni oleh masyarakat miskin. Melalui program pembangunan desa terpadu dan proyeksi produksi yang berorientasi di desa.
- Bantuan telah difokuskan pada kelompok dengan karakteristik sosio-ekonomi yang sama yang mendorong atau mendukung

mereka untuk terus berkubang dalam siklus kemiskinan melalui proyek yang dirancang untuk komunitas tertentu.

5. Kemiskinan Menurut Islam

Masalah kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah penting yang berdampak besar pada kehidupan sosial dan individu. Kemiskinan dipandang sebagai aktivitas yang mengganggu dan sumber kejahatan. Hal itu dijelaskan dalam hadits:

عَدَاةُ الْفَقْرِ يَكُونُ كُفْرًا

Kemiskinan dekat kepada ketukuran.

Hadits menjelaskan bahwa kemiskinan mendekati kekufuran karena dikhawatirkan akan banyak terjadi kejahatan, perolehan harta, keserakahan, sanjungan, musyrik, korupsi, dll. Kemiskinan dapat menggelapkan mata manusia kecuali disertai dengan iman dan kesabaran.

PEMBAHASAN

Pandemi saat ini tergolong baru, artinya disebabkan oleh virus COVID-19. Di masa pandemi, masyarakat harus beradaptasi dengan kehidupan akibat perubahan yang signifikan. Diantaranya adalah perubahan kebiasaan seperti berjalannya perekonomian, mobilitas yang terbatas atau banyaknya pengangguran, yang merupakan dampak besar dari PHK karena banyak perusahaan yang bangkrut, UMKM tidak lagi bekerja, dll. berdampak pada semua lini. kehidupan seperti agama, masyarakat, ekonomi serta adat istiadat dan budaya.

Pemerintah pusat dan daerah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan pemerintah antara lain memberikan kompensasi berupa sembako atau uang. Namun, penyediaan barang kebutuhan pokok atau uang itu sendiri masih dipandang timpang. di daerah-daerah yang perlu diwaspadai oleh pemerintah antara lain kurangnya akses, kurangnya modal bagi masyarakat untuk melanjutkan usaha, tidak adanya arahan pemerintah untuk melanjutkan program yang sudah ada di

masyarakat, sehingga dampaknya kurang terhadap kemajuan program sedang disusun dan strategi.

Dilihat dari praktik lokal, kehidupan masyarakat Jawa Barat kekurangan sumber daya manusia, modal, dan dukungan pemerintah. Pemerintah harus mampu menggambarkan pelaksanaan ekonomi kerakyatan sehingga dapat menyasar dari atas ke bawah. Pemerintah memantau dengan cermat bagaimana orang mengumpulkan modal, memproduksi produk, memasarkannya, dan mempertahankan bisnis mereka. Sekalipun masyarakat mendapat dukungan modal, tanpa kemampuan dan kontrol pemerintah, perekonomian tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Analisis-analisis dari kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah :

1. Akses Pendidikan Untuk Semua

Sebagaimana telah tertuang dalam tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa . Upaya yang dilakukan pemerintah sejak era orde baru telah dilakukan antara lain wajib belajar 9 tahun dari sekolah dasar hingga menengah, namun pemerataan pendidikan masih kecil.

Pemerintah Jawa Barat melalui kebijakan pendidikan dalam programnya berencana pemerintah Jawa Barat akan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat yang bersekolah di sekolah menengah atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam pengajuan RKPD BAPPEDA Jabar tahun 2022 disebutkan bahwa pemerintah Jabar mengatur hal tersebut agar akses pendidikan di wilayah Jabar lebih merata.

Jawa Barat memiliki wilayah yang luas dan belum semuanya dapat tersentuh

teknologi, namun pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan di wilayah ini. Menurut website jabarprov.go.id, provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 km² dan menurut data SIAK, provinsi Jawa Barat berpenduduk 46 jiwa.497.175 jiwa. Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat seringkali menunjukkan kemajuan yang positif sejak tahun 2010. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pada tahun 2019-2020 juga mengalami percepatan, dengan kinerja IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 melampaui IPM nasional. Rata-rata. IPM provinsi Jawa Barat mencapai 70,09 pada tahun 2020, melampaui IPM nasional sebesar 71,49.

2. Desentralisasi Layanan Kesehatan

Levey Loomba mengatakan perawatan kesehatan adalah upaya organisasi, baik kolektif maupun mandiri, untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kelompok, individu, dan komunitas. Pelayanan kesehatan yang baik memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah Jawa Barat berencana memberikan bantuan berupa anggaran kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima manfaat PBI sebanyak orang merupakan peserta jaminan kesehatan fakir miskin berdasarkan UU SJSN, dimana iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Selain kebijakan pemerintah yang disusun dalam bentuk anggaran yang disediakan oleh pemerintah Jawa Barat, juga memberikan pendidikan untuk layanan kesehatan.

Menurut Kompas, selain PBI, pemerintah Jabar akan segera membuka Mobile Health Center (MPUS) melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jabar. Program ini dimulai untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di setiap pelosok Jawa Barat.

3. Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis Inovasi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi bagi masyarakatnya. Kapasitas ini tumbuh seiring kemajuan teknologi dan penyesuaian ideologis dan institusional yang dibutuhkannya. Dalam RKP 2022 Tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang disusun Pemprov Jabar, ada 7 perbaikan yang akan menjadi prioritas nasional. Prioritas utama nasional dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan merata. , kembangkan sumber daya manusia dan gunakan teknologi dan sains.

Dalam konteks inovasi baru, penting dilakukan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi guna memenuhi permintaan pasar dan mengembangkan inkubator.

4. Pengembangan destinasi dan infrastuktur pariwisata

Pengembangan kepariwisataan adalah upaya untuk mengembangkan atau mempromosikan obyek wisata agar obyek wisata tersebut lebih menarik dan terlihat dari segala sudut pandang serta obyek yang terkandung di dalamnya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Pemerintah Jawa Barat meliputi:

- a. Pengembangan destinasi wisata;
- b. Peningkatan promosi wisata;
- c. Insentif paket wisata di destinasi prioritas;
- d. Peningkatan event seni, budaya, dan olah raga;
- e. Pengembangan kualitas ekonomi kreatif;
- f. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung.

Kompas.com melaporkan, Pemprov Jabar berencana mengembangkan 76 destinasi wisata baru berbasis alam di 21 kabupaten/kota di wilayahnya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan berupaya menuntaskan kerja sama pengembangan pariwisata di

wilayah Ciater dan Kabupaten Subang. "Ciater puncaknya Bandung, udaranya segar, tehnya enak, pemandangannya indah."

5. Pendidikan Agama dan Ibadah Juara

Islam sebagai pedoman hidup berakar pada sumber-sumber ketuhanan. Islam didasarkan pada etika dan aturan hidup manusia. Dalam Islam ada aturan dan tata cara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aturan dan semangat agama Islam ditransfer ke pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam.

Dengan mengingat pentingnya pendidikan agama. Pemerintah Jawa Barat telah membuat tiga program unggulan, yaitu:

- a. Disebut Kredit Masyarakat Sejahtera atau Kredit Mesra, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman modal kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Jemaah Subuh dan Masjid Al Qur'an bekerja sama dengan para pembina di kabupaten/kota untuk kegiatan ini dan bahkan gubernur dan wakil gubernur berbagi tugas, tugas ini di berbagai masjid di Jawa Barat untuk melaksanakannya.
- c. Ulama Juara, untuk memperkuat pesantren perlu peningkatan kualitas keterampilan para Ajengan atau Ulama.

6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan irigasi, drainase, transportasi, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi. Program infrastruktur di Indonesia secara umum mengalami kemajuan. Infrastruktur merupakan program penting untuk membangun proses pembangunan nasional. Program infrastruktur menjadi program unggulan pemerintah Jawa Barat.

Infrastruktur menempati urutan keenam dalam skala prioritas penduduk Jawa Barat.

Tujuan dari infrastruktur konektivitas regional ini adalah untuk menjadikannya sebagai sarana penghubung antar wilayah. Upaya peningkatan konektivitas wilayah yang indikatornya ditandai dengan aksesibilitas dan stabilitas jalan di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat sedang membangun jalan untuk melaksanakan program tersebut.

7. Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)

Wilayah pedesaan digunakan sebagai ujung tombak dalam pembangunan daerah di tingkat nasional. Pemerintah Jawa Barat juga melakukan pembangunan di wilayahnya dengan membangun desa-desa dengan program Gerbang Desa. Menurut Kartasasmita, hakikat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang menjadi pusat segala upaya pembangunan, yang dikembangkan adalah kekuatan dan kemampuannya sebagai pelaksana, dan yang dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan promotor pembangunan.

Tujuan pembangunan perkotaan itu sendiri adalah untuk merekonsiliasi pembangunan perkotaan dan pedesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan inovasi dengan Desa Juara yang memiliki tiga pilar yaitu digitalisasi pelayanan desa, *One Village One Company* (OVOC) dan gerakan pembangunan desa (Gerbang Desa).

8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah

Menurut Bank Dunia, definisi kemiskinan adalah hilangnya kekayaan. Di Jawa Barat, dalam pemaparan RKPD-BAPPEDA disebutkan bahwa tahun 2016-2020 terjadi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Walaupun kondisi tersebut juga menunjukkan adanya perlambatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan karena kondisi

ekonomi makro nasional. Proporsi penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebesar 10,19%, lebih rendah dari penduduk pedalaman.

9. Subsidi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Pemprov Jabar terus mendorong 27 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar untuk memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan dan pembangunan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, diharapkan akan ada inovator-inovator dari daerah yang mampu menghasilkan karya-karya hebat dan hebat.

D. KESIMPULAN

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat di bawah kewenangannya sendiri telah dilaksanakan sesuai rencana, meskipun masih belum berjalan 100% mengingat provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang luas. sembilan skala prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Jawa Barat, beberapa diantaranya sudah berjalan dengan baik dan banyak mengalami perubahan antara lain program Rutilahu, penganggaran untuk masyarakat miskin, pemerataan pendidikan, penyediaan PNS, pondok pesantren, pesantren dan sebagainya. Infrastruktur daerah dengan konstruksi jalan yang rusak juga dikerjakan di beberapa daerah.

Pariwisata yang termasuk dalam pilar pemerintahan Jabar juga ikut berkembang, terlihat di Jabar banyak tempat wisata baru untuk menyambut kehidupan normal pasca pandemi.

E. REFERENSI

BAPPEDA Jawa Barat. Paparan RKPD 2022. 21 Maret 2020
Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Cetakan kelima. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press. Hal 117

Humas Provinsi Jawa Barat. Pemda Prov Jabar terus tingkatkan konektivitas wilayah. <http://humas.jabarprov.go.id>. Diakses : 8 September 2021. Pukul 10.30 WIB

Humas Provinsi Jawa Barat. Jabar Gelar Muserenbang RJMPD 2018-2023. <http://humas.jabarprov.go.id/jabar-gelar-muserenbang-perubahan-rjmd-2018-2023/4028>. Diunduh pada Selasa, 24 Agustus 2021. Pukul 04.45

Islamy, M. Irfan. 2017. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. cet VIII. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 20

James, E. Anderson. 2015. Publik Policy Making. 8th Edition. Stamford, CT: Cengage Learning.

JDIH Jabar Prov. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 43 Tahun 2020 Petunjuk Teknis. <https://jdih.jabarprov.go.id>. Diunduh pada : Rabu, 8 September 2021. Pukul 06.38 WIB.

Kartasasmita Ginanjar. 2001. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo. Halaman 66.

Kemenag.go.id. Pemprov Jabar bersinergi membenahi pendidikan PONTREN. <https://jabar.kemenag.go.id>. Diakses : 8 September 2021. Pukul 10.00 WIB.Kompas.com. Maksimalkan Layanan Kesehatan, Pemprov JabarLuncurkan MPUS. <https://regional.kompas.com>. Diakses : 8 September 2021. Pukul 9:13.

Sukirno, Sadano. 2011. Makro EkonomiTeori Pengantar. Edisi ketiga. Jakarta : Rajawali Press. Hal. 331.

Supriatna. 1997. Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan. impac. Hal. 90.

Tempo.co. Jawa Barat dorong daerah Inovasi Pelayanan Publik. <https://nasional.tempo.co>. Diakses : 8 September 2021. Pukul 10.30 WIB

Tempo.co. Jawa Barat kembangkan 76 destinasi wisata baru berbasis alam. <https://travel.tempo.co>. Diakses : 8 September 2021. Pukul 9:13

Tempo.co. Pemprov Jabar fokus bangun
desa. <https://nasional.tempo.co/read>.
Diakses : 8 September 2021. Pukul
10.30 WIB